

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI TK AS ADIYAH LOMPENGENG**

Gusnaini¹, Darmawan², Nurcaya³

Program Pascasarjana Administrasi Pendidikan, Universitas Puangrimaggalatung

²nurcaya.aydin17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the school committee in the procurement of learning facilities and infrastructure for Early Childhood Education at TK As Adiyah Lompengeng, to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of the school committee's role, and to analyze the efforts made by the school committee to overcome obstacles in the procurement process. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the school principal, teachers, school committee members, and representatives of parents. The results of the study indicate that the role of the school committee in the procurement of learning facilities and infrastructure at TK As Adiyah Lompengeng has been carried out well. As an advisory body, the committee is involved in providing suggestions and input on various school program plans. As a supporting body, it contributes both ideas and efforts. As a controlling body, it participates in monitoring the implementation of school programs. As a mediator, it bridges the interests of the community, parents, and the school effectively. However, several inhibiting factors were identified, including the lack of parental participation, differences in interests among stakeholders, and limited trust in the school committee.

Keywords: School Committee Role, Facilities and Infrastructure, Kindergarten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di TK As Adiyah Lompengeng, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran komite sekolah dan menganalisis upaya yang dilakukan komite sekolah untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di TK As Adiyah Lompengeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, serta pengurus komite sekolah dan perwakilan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di TK As Adiyah Lompengeng selaku pemberi pertimbangan tampak melalui keterlibatannya dalam memberikan saran serta masukan terhadap berbagai rencana program sekolah, sebagai pendukung senantiasa memberikan kontribusi berupa tenaga maupun gagasan, sebagai pengontrol tercermin dalam keterlibatannya dalam memantau jalannya berbagai program dan sebagai mediator

mampu menjembatani berbagai kepentingan antara masyarakat, orang tua dan pihak sekolah yang sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya partisipasi dari orang tua, adanya perbedaan kepentingan antara pihak – pihak yang terlibat, dan kurangnya kepercayaan terhadap komite sekolah.

Kata kunci : Peran Komite Sekolah, Sarana dan Prasarana, Taman Kanak – Kanak

A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fase fundamental dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan sosial individu. Pada masa *golden age* ini, anak memiliki potensi perkembangan otak yang sangat pesat, sehingga membutuhkan stimulasi lingkungan yang kaya akan nilai edukatif. Kualitas pendidikan pada jenjang ini tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan kompetensi pengajar, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses bermain sambil belajar. Tanpa fasilitas yang memadai, proses transformasi ilmu dan stimulasi motorik anak akan terhambat, yang pada jangka panjang dapat memengaruhi kesiapan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Sarana dan prasarana dalam konteks PAUD memiliki karakteristik khusus yang harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan nilai edukatif tinggi. Hal ini sejalan dengan

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap satuan PAUD wajib memiliki sarana dan prasarana yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak. Sarana seperti Alat Permainan Edukatif (APE) luar dan dalam ruangan berfungsi sebagai media stimulasi yang merangsang daya cipta serta kognitif anak secara alami. Oleh karena itu, pengelolaan sarana prasarana bukan sekadar masalah teknis inventarisir, melainkan bagian dari strategi pedagogis untuk menciptakan atmosfer belajar yang bermakna.

Namun, pada realitanya, banyak lembaga PAUD—khususnya yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat—menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan sumber daya finansial. Di TK As Adiyah Lompengeng, fenomena ini tampak pada dukungan sarana prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan standar pendidikan nasional

dengan kondisi nyata di lapangan. Jika hanya mengandalkan bantuan operasional dari pemerintah yang jumlahnya terbatas, maka akselerasi pemenuhan fasilitas belajar akan sulit tercapai. Di sinilah peran masyarakat yang direpresentasikan melalui komite sekolah menjadi kunci utama.

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Secara teoretis, merujuk pada Teori Sistem oleh Ludwig von Bertalanffy, sekolah adalah sistem terbuka yang keberlangsungannya sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan eksternalnya. Komite sekolah berfungsi sebagai *linkage subsystem* yang menjembatani kebutuhan sekolah dengan sumber daya yang ada di masyarakat. Sejalan dengan Teori Partisipatif dari Mary Parker Follett, efektivitas administrasi pendidikan sangat bergantung pada prinsip *power-with*, yaitu kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan.

Secara regulasi, peran ini telah diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang memberikan legalitas bagi komite untuk meningkatkan mutu pelayanan

pendidikan melalui empat fungsi: pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Meskipun payung hukum telah tersedia, pengamatan di TK As Adiyah Lompengeng menunjukkan dinamika yang unik dalam implementasi peran tersebut. Masih terdapat tantangan berupa pemahaman pengurus yang belum merata serta kendala komunikasi dengan wali murid dalam penggalangan dukungan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai peran komite dalam pengadaan sarana prasarana, guna merumuskan pola kolaborasi yang efektif demi terciptanya lingkungan belajar PAUD yang lebih berkualitas dan inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menangkap fenomena sosial secara naturalistik dan memahami makna di balik interaksi antara komite sekolah dengan pihak lembaga pendidikan. Lokasi penelitian berpusat di TK As

Adiyah Lompengeng, Kabupaten Soppeng, yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena karakteristik uniknya sebagai lembaga PAUD swasta yang memiliki dinamika partisipasi masyarakat yang cukup aktif di tengah keterbatasan fasilitas.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari elemen-elemen kunci pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan. Informan tersebut meliputi Kepala Sekolah selaku manajer satuan pendidikan, pengurus komite sekolah sebagai representasi masyarakat, serta guru sebagai pengguna langsung sarana prasarana. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk menghasilkan data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang (*multiperspektif*) mengenai fungsi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, motivasi, dan kendala

yang dihadapi komite dalam pengadaan fasilitas.

2. Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik sarana prasarana, ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE), serta keterlibatan komite dalam rapat-rapat sekolah.
3. Dokumentasi: Menelaah arsip relevan seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), daftar inventaris barang, serta berita acara rapat komite.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara antara kepala sekolah, komite, dan guru, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara dengan bukti fisik di lapangan serta dokumen tertulis.

Analisis data dilakukan secara mengalir (*flow model*) mengikuti tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi:

1. Kondensasi Data: Memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah

- dari lapangan menjadi catatan yang lebih fokus pada peran komite.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks peran untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Mencari pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat yang kemudian diverifikasi ulang dengan data lapangan untuk memastikan validitas temuan akhir.

Kursi Siswa	40	Baik	Milik Sendiri
Alat Permainan Edukatif (APE)	12	Cukup	Perlu Penambahan
Papan Tulis (Whiteboard)	2	Baik	Milik Sendiri
Lemari Administrasi/Loker	2	Cukup	Milik Sendiri
Lingkungan Bermain Luar	1 unit	Baik	Pemeliharaan Rutin

Sumber: Data Primer Inventaris TK As Adiyah Lompengeng (2026)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Objektif Sarana dan Prasarana

Sebelum menganalisis peran komite, penelitian ini mengidentifikasi kondisi nyata fasilitas di TK As Adiyah Lompengeng. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, ketersediaan sarana prasarana di rombongan belajar menunjukkan variasi tingkat kelayakan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana di Rombongan Belajar

Sarana dan Prasaran			
Jenis	Jumlah	Kondisi	Ket.
Meja Siswa	20	Baik	Milik Sendiri

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun sarana dasar telah terpenuhi, terdapat kebutuhan mendesak pada aspek pengembangan kualitas, seperti pemutakhiran APE dan fasilitas penunjang lainnya yang memerlukan dukungan pendanaan di luar bantuan operasional pemerintah.

2. Implementasi Peran Komite Sekolah

Hasil penelitian mengungkap bahwa Komite Sekolah di TK As Adiyah Lompengeng menjalankan empat peran strategis dalam mengatasi keterbatasan fasilitas tersebut:

- a. Peran sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Kepala Sekolah:

"Kami selalu melibatkan komite dalam penyusunan anggaran, terutama untuk barang-barang yang mendesak seperti perbaikan pagar atau pengadaan APE baru agar anak-anak lebih betah belajar."

Secara teoretis, hal ini selaras dengan Teori Partisipatif dari Mary Parker Follett yang menekankan pada "kekuatan bersama" (*power-with*). Komite bukan sekadar stempel formalitas, melainkan mitra strategis. Partisipasi ini muncul karena adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi, sehingga pertimbangan yang diberikan didasarkan pada kebutuhan nyata siswa di lapangan.

b. Peran sebagai Pendukung
(*Supporting Agency*)

Sebagai lembaga pendukung, komite di TK As Adiyah Lompengeng menunjukkan peran yang sangat dominan dalam aspek finansial dan material. Karena dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggara) seringkali terbatas pada operasional rutin, komite mengambil alih tanggung

jawab untuk pengembangan infrastruktur.

"Kami menggerakkan orang tua melalui sumbangan sukarela. Tidak ada paksaan, tapi kami jelaskan bahwa kursi yang nyaman atau TV untuk belajar itu untuk anak-anak mereka sendiri," ungkap salah satu pengurus komite.

Analisis Peneliti: Tindakan ini merupakan manifestasi dari fungsi komite sebagai sumber daya eksternal yang vital. Hal ini memperkuat Teori Sistem bahwa sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa asupan energi (sumber daya) dari lingkungannya.

c. Peran sebagai Pengontrol
(*Controlling Agency*)

Pengawasan yang dilakukan komite lebih berfokus pada hasil akhir dari pengadaan sarana. Mereka memastikan bahwa setiap dana yang dikumpulkan dari masyarakat dikonversi menjadi barang yang berkualitas.

"Setiap ada barang baru, komite mengecek kualitasnya. Mereka ingin memastikan bahwa barang yang dibeli awet dan aman untuk anak usia dini," jelas salah satu guru.

Meskipun pengawasan ini dilakukan secara informal dan

kekeluargaan, dampaknya sangat terasa pada transparansi pengelolaan sekolah. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan orang tua murid.

d. Peran sebagai Mediator (*Mediating Agency*)

Sebagai penghubung, komite berperan menenangkan kekhawatiran orang tua terkait kebijakan sekolah atau kebutuhan biaya tambahan. Komite mampu menerjemahkan bahasa birokrasi sekolah ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat pedesaan di sekitar Lompengeng.

Matriks berikut merangkum efektivitas peran tersebut:

Tabel 2. Matriks Pelaksanaan Peran Komite

Peran Komite	Tindakan Nyata di Lapangan	Hasil/Dampak
Pertimbangan	Masukan dalam rapat RKJM dan RKAS.	Perencanaan program lebih tepat sasaran.
Pendukung	Penggalangan dana dan tenaga swadaya.	Rehabilitasi pagar dan pengadaan <i>Smart TV</i> .
Pengontrol	Pemantauan kelayakan sarana secara berkala.	Terjaminnya akuntabilitas penggunaan aset.
Mediator	Sosialisasi program sekolah ke wali murid.	Minimnya konflik dan meningkatnya partisipasi.

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian (2026)

3. Pembahasan: Sinergi dalam Keterbatasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peran komite di TK As Adiyah Lompengeng bukan hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan penggerak roda organisasi. Temuan mengenai dominannya peran "pendukung" dibandingkan "pengontrol" menunjukkan bahwa di tingkat pendidikan anak usia dini, fokus utama masyarakat masih pada penyediaan kebutuhan fisik dasar. Namun, sinergi yang terbangun melalui prinsip *power-with* telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dibandingkan jika sekolah hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Analisis ini mengonfirmasi bahwa transparansi yang dilakukan melalui fungsi mediator menjadi kunci utama tingginya partisipasi masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai peran

komite sekolah di TK As Adiyah Lompengeng, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama:

- a. Efektivitas Peran Multidimensi: Komite sekolah telah mengimplementasikan empat peran utama (pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator) secara integratif. Kehadiran komite berhasil mentransformasi keterbatasan anggaran pemerintah menjadi peluang pengadaan sarana mandiri, seperti pengadaan fasilitas digital (*Smart TV*) dan rehabilitasi area bermain luar yang aman bagi anak.
- b. Sinergi Partisipatif sebagai Kunci: Kesuksesan pengadaan sarana prasarana didorong oleh pola kepemimpinan sekolah yang terbuka dan model kolaborasi *power-with*. Hal ini membuktikan bahwa ketika masyarakat (melalui komite) diberikan ruang untuk memberikan pertimbangan dan melakukan kontrol, rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap sekolah meningkat, yang berujung pada tingginya dukungan material dan finansial.
- c. Dominasi Peran Praktis: Terdapat kecenderungan bahwa peran

sebagai "pendukung" dan "mediator" lebih menonjol dibandingkan peran "pengontrol".

Hal ini menunjukkan bahwa dinamika komite di tingkat pendidikan anak usia dini lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik yang mendesak dan harmonisasi hubungan sosial antara sekolah dengan wali murid.

- d. Kepatuhan Regulasi: Secara administratif, pola kerja komite di TK As Adiyah Lompengeng telah selaras dengan amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, di mana komite memposisikan diri sebagai mitra mandiri yang menjamin mutu pelayanan pendidikan tetap terjaga meski dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran konstruktif sebagai berikut:

- a. Bagi Pengurus Komite Sekolah
 - Disarankan untuk mulai menyusun program kerja pengawasan sarana secara periodik dan terdokumentasi, sehingga fungsi kontrol tidak hanya dilakukan saat terjadi

kerusakan atau pengadaan baru, tetapi juga pada aspek pemeliharaan aset secara berkelanjutan.

- Meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat luas, bukan hanya wali murid aktif, untuk memperluas jejaring dukungan sarana prasarana dari sektor swasta atau tokoh masyarakat lainnya.
- b. Bagi Pihak Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru)
- Diharapkan memberikan ruang literasi yang lebih luas bagi pengurus komite mengenai standar minimum sarana prasarana PAUD sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, agar usulan atau pertimbangan yang diberikan oleh komite semakin berkualitas dan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - Mempertahankan transparansi pelaporan penggunaan dana yang dihimpun melalui komite guna menjaga kepercayaan (*trust*) yang telah terbangun dengan sangat baik.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Penelitian ini berfokus pada aspek kualitatif di satu lembaga.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara lembaga PAUD yang memiliki komite aktif dengan yang tidak aktif untuk melihat signifikansi perbedaannya terhadap kualitas *output* belajar siswa.

- Disarankan pula untuk meneliti variabel lain seperti "Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Memberdayakan Komite" untuk melihat faktor internal yang memperkuat peran komite di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustin, M., & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novianti, R. (2021). *Dasar-dasar pendidikan anak usia dini*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Hasnida, & Azhari, H. (2025). Fungsi manajemen George Robert Terry dalam pandangan Indonesia. *Al-Ashriyyah*.

- doi:10.53038/alashriyyah.1012
.207
- Maulina, I., & Budiyo, A. (2021). Peran keluarga dalam pengelolaan emosi anak usia golden age. *Jurnal Mahasiswa BK An Nur*.
- Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh komite sekolah dalam kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1). doi:10.24239/jimpi.v1i1.901
- Putri, & Suwandi. (2025). Teori klasik dan efektivitas organisasi di era digital. *Journal of Literature Review*, 2. doi:10.63822/smr1r04
- Riskiyani, R. P., Syarifuddin, S., & Muizdati, N. (2022). Peran orang tua dalam mengembangkan potensi anak pada masa golden age. *Jurnal Basicedu*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Dokumen Regulasi:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.